

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL LANGKAH KONKRET TERHADAP PENANGANAN BANJIR DI SUMATERA

Fazriman Fadhulullah Shabir, Muhammad Radi Aziqri

Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tazkia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2025

Revised Desember 2025

Accepted Desember 2025

Available online Desember 2025

Email:

2410101039.fazriman@student.tazkia.ac.id

2410101078.radi@student.tazkia.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di wilayah Sumatera dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan yang signifikan. Kondisi geografis, perubahan tata guna lahan, serta lemahnya pengelolaan lingkungan menjadi faktor utama yang memperparah risiko banjir di berbagai daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah-langkah konkret terkait penanganan banjir di Sumatera. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap kebijakan, regulasi, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan struktural dan non-struktural, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penataan ruang, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah melalui kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: peran pemerintah, banjir, kebijakan publik, mitigasi bencana, Sumatera

Abstract

Flooding is one of the most frequent natural disasters in Sumatra and has caused significant social, economic, and environmental impacts. Geographical conditions, land-use changes, and weak environmental management have become major factors that increase flood risks in many areas. In this context, the role of government is crucial, not only in emergency response but also in prevention and long-term disaster risk reduction efforts. This study aims to examine the role of central and local governments in taking concrete actions to address flooding issues in Sumatra. The research employs a qualitative approach through a literature review of policies, regulations, and relevant previous studies. The findings indicate that the government has implemented various structural and non-structural measures, including flood control infrastructure development, spatial planning, and community capacity building. However, the implementation of these policies still faces several challenges, particularly in terms of inter-agency coordination, budget limitations, and low community participation. Therefore, strengthening the government's role through more integrated and environmentally sustainable policies is essential.

Keywords: government role, flooding, public policy, disaster mitigation, Sumatra

Pendahuluan

Banjir merupakan fenomena alam yang hampir setiap tahun melanda berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera. Intensitas dan frekuensi banjir yang terus meningkat menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat lagi dipandang sebagai kejadian alam semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Di berbagai provinsi di Sumatera, banjir telah menimbulkan kerugian besar, mulai dari kerusakan

infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa.

Secara geografis, Sumatera memiliki banyak daerah aliran sungai besar yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga menjadikan wilayah ini rentan terhadap banjir, terutama ketika pengelolaan lingkungan tidak dilakukan secara optimal. Alih fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan, permukiman, dan industri telah mengurangi daya serap tanah terhadap air. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong peningkatan kebutuhan lahan tanpa diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang memadai.

Dalam menghadapi permasalahan banjir, pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengambil kebijakan, pelaksana program, serta koordinator berbagai pihak terkait. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mampu merumuskan langkah-langkah konkret yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Penanganan banjir yang efektif membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, berbagai kebijakan dan program penanganan banjir sering kali belum memberikan hasil yang optimal. Masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Koordinasi antar instansi pemerintah, baik vertikal maupun horizontal, sering menjadi kendala utama. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi banjir juga masih relatif rendah, sehingga program yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran pemerintah dalam mengambil langkah konkret terkait penanganan banjir di Sumatera menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan yang telah diambil, tantangan yang dihadapi, serta peluang perbaikan di masa mendatang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peran pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan penanganan banjir di Sumatera?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat lokal?
3. Apa saja langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan banjir di Sumatera?
4. Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas peran pemerintah dalam penanganan banjir?
5. Bagaimana koordinasi antar lembaga pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir?
6. Sejauh mana partisipasi masyarakat dilibatkan dalam kebijakan penanganan banjir?
7. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap pengurangan risiko banjir di Sumatera?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir di Sumatera.
2. Mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi banjir.
3. Mengkaji hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan.
4. Menilai efektivitas kebijakan penanganan banjir yang telah diterapkan.
5. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran pemerintah dalam mitigasi banjir di masa depan.

Manfaat dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari sisi praktik kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian kebijakan publik dan manajemen bencana, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam penanganan banjir. Kajian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan penanggulangan banjir dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam konteks wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi seperti Sumatera.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, pengelolaan lingkungan, dan peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan konsep dan pendekatan baru dalam penanganan banjir yang lebih berorientasi pada pencegahan dan keberlanjutan lingkungan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penanganan banjir yang lebih efektif. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko banjir.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa konsep utama yang berkaitan dengan peran pemerintah, kebijakan publik, mitigasi bencana, serta karakteristik banjir di wilayah Sumatera. Peran pemerintah dalam kebijakan publik mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui penyusunan regulasi dan pelaksanaan program yang tepat.

Kebijakan publik dalam penanganan banjir bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanganan banjir tidak dapat dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dalam hal ini, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam menjadi aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kerawanan banjir.

Konsep mitigasi bencana menekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Mitigasi banjir mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengelolaan daerah aliran sungai, pelestarian hutan, hingga peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Di wilayah Sumatera, mitigasi bencana menjadi semakin penting mengingat tingginya tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah dalam penanganan banjir, bukan untuk mengukur fenomena secara statistik. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga negara, serta buku dan artikel ilmiah yang membahas kebijakan publik dan penanggulangan bencana.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan tujuan untuk menggambarkan peran pemerintah, bentuk kebijakan yang diambil, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan banjir di Sumatera. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun analisis yang komprehensif dan kontekstual sesuai dengan kondisi yang ada.

Pembahasan

Banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan yang tinggi memang menjadi pemicu utama, namun dampak banjir akan semakin besar ketika tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang baik. Dalam kondisi ini, peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, mengatur pemanfaatan ruang, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan nasional terkait penanggulangan banjir. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program penanganan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam konteks Sumatera, kebijakan nasional menjadi dasar penting karena wilayah ini memiliki banyak daerah aliran sungai besar yang melintasi lebih dari satu provinsi.

Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran langsung dalam implementasi kebijakan penanganan banjir. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti perbaikan sistem drainase, pembangunan tanggul, serta normalisasi sungai. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam pengawasan terhadap pemanfaatan lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah sering menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Selain pendekatan struktural, pemerintah juga berupaya menerapkan pendekatan non-struktural dalam penanganan banjir. Pendekatan ini mencakup penyusunan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling terdampak ketika banjir terjadi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lingkungan.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan banjir masih belum optimal. Banyak masyarakat yang masih memandang banjir sebagai kejadian alam yang tidak dapat dihindari, sehingga upaya pencegahan sering kali diabaikan. Dalam kondisi ini, pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dalam membangun kesadaran kolektif melalui program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatan partisipatif menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang terlibat langsung dalam proses penanggulangan banjir.

Koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penanganan banjir di Sumatera. Penanganan banjir melibatkan banyak sektor, mulai dari pekerjaan umum, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, hingga penanggulangan bencana. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan dan program yang dijalankan berpotensi tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan jelas agar setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara optimal.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penanganan banjir di Sumatera membutuhkan peran pemerintah yang kuat, konsisten, dan terintegrasi. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat ketika banjir terjadi, tetapi juga harus mampu merancang kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada pencegahan dan keberlanjutan lingkungan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa banjir di wilayah Sumatera merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan jangka pendek semata. Peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan upaya penanganan banjir, baik melalui kebijakan, program, maupun koordinasi antar pihak terkait.

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan banjir. Kebijakan nasional tersebut memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan sumber daya air, penataan ruang, serta penanggulangan bencana. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam penanganan banjir di Sumatera, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan penerapan kebijakan non-struktural melalui regulasi dan edukasi masyarakat. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Selain itu, penanganan banjir masih cenderung bersifat reaktif, yaitu lebih fokus pada penanganan darurat setelah banjir terjadi. Padahal, upaya pencegahan dan mitigasi seharusnya menjadi prioritas utama untuk mengurangi risiko dan dampak banjir di masa mendatang. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanganan banjir di Sumatera sangat bergantung pada konsistensi peran pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta kemampuannya dalam membangun sinergi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tanpa adanya kerja sama yang kuat dan berkelanjutan, upaya penanganan banjir tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Daftar Pustaka

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2018). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). *Kajian Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Penanggulangan Banjir di Indonesia*. Jakarta: BNPB.

Bappenas. (2017). *Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Bappenas. (2019). *Perencanaan Pembangunan Berbasis Pengurangan Risiko Bencana*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.

Handayani, W., & Rudiarto, I. (2018). Analisis kebijakan penanggulangan banjir di wilayah perkotaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 29(2), 123-135.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia*. Jakarta: KLHK.

Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offset.

Marfai, M. A. (2016). Dampak perubahan penggunaan lahan terhadap risiko banjir. *Jurnal Geografi*, 13(1), 1-12.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Putra, F. (2015). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan*. Malang: UB Press.

Rahman, A., & Suryanto. (2019). Peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana banjir. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 210-225.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryana. (2016). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.

Sutopo, P. N. (2019). Kebijakan mitigasi bencana banjir di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 45-60.

Triatmodjo, B. (2015). *Hidrologi Terapan*. Yogyakarta: Beta Offset.

UNDRR. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Geneva: United Nations.

World Bank. (2018). *Disaster Risk Management in Indonesia*. Washington DC: World Bank.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications*. Thousand Oaks: Sage Publications.